ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i2.5554

KEBERADAAN PAGAR LAUT DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI: RESPON MASYARAKAT DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

The Existence of Sea Fences in Bekasi Regency: Community Response and the Resulting Impact

Muhammad Fikriansyah Aulia[1], Muhammad Zid[2], Ananto Kusuma Seta[3], Cahyadi Setiawan[4]
Universitas Negeri Jakarta
muhammadfikriansyah104@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 28, 2025	Apr 12, 2025	Apr 24, 2025	Apr 29, 2025

Abstract

The construction of illegal sea fences in Tarumajaya District, Bekasi Regency, has restricted fishermen's access to marine resources, triggering environmental degradation, economic decline, and social conflict. This study aims to analyze the impacts of sea fence construction in Bekasi Regency from environmental, social, and economic aspects, as well as the responses of coastal communities in Bekasi Regency. This research uses a qualitative approach to explore the social and economic dynamics of coastal communities through observations in Tarumajaya District, Bekasi Regency, as well as in-depth interviews with fishermen, policymakers, and affected communities. The findings reveal that, from a social perspective, the sea fences have triggered horizontal conflicts among fishermen due to competition over fishing grounds and have led to social exclusion, worsening the welfare of coastal

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

communities. From an economic standpoint, reduced catches have caused a decline in fishermen's incomes and forced some to switch professions, though alternative job options often lack comparable stability.

Keywords: Bekasi Regency, Coastal Communities, Fishermen, Sea Fence

Abstrak: Pembangunan pagar laut ilegal di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, telah membatasi akses nelayan terhadap sumber daya laut, memicu degradasi lingkungan, penurunan ekonomi, dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan pagar laut di Kabupaten Bekasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta respons masyarakat pesisir Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir melalui observasi di wilayah Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, serta wawancara mendalam dengan para nelayan, pemangku kebijakan, dan komunitas yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari aspek sosial, pagar laut memicu konflik horizontal antar nelayan akibat persaingan ruang tangkap serta menimbulkan eksklusi sosial yang memperburuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam aspek ekonomi, berkurangnya hasil tangkapan menyebabkan penurunan pendapatan nelayan dan mendorong sebagian dari mereka untuk berpindah profesi, meskipun pilihan kerja alternatif sering kali tidak menawarkan stabilitas yang setara.

Kata Kunci: Kabupaten Bekasi, Masyarakat Pesisir, Nelayan, Pagar Laut

PENDAHULUAN

Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali di wilayah pesisir sering kali mengarah pada degradasi lingkungan dan konflik kepentingan (Anastasia et al., 2024). Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam aspek ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat, terutama sebagai pusat aktivitas perikanan, perdagangan, serta pemukiman (Krisna et al., 2021). Namun, tekanan besar akibat urbanisasi dan eksploitasi sumber daya alam semakin memperburuk kondisi lingkungan (Kunzmann et al., 2022). Selain itu, lemahnya regulasi serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pembangunan turut mempercepat degradasi pesisir (Basri, 2021).

Perubahan tata kelola pesisir di berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang jelas, eksploitasi sumber daya laut cenderung semakin tidak terkendali (Quina & Subagiyo, 2020). Di Thailand, pembangunan tembok laut dan proyek reklamasi di kawasan pesisir menyebabkan hilangnya lahan perikanan tradisional, yang berdampak pada pendapatan nelayan kecil dan meningkatkan konflik sosial dengan pengembang swasta (Charoenlerkthawin et al., 2022). Sementara itu, di Filipina, lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan pesisir telah menyebabkan privatisasi akses

pantai yang menghambat komunitas nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka (Fabinyi et al., 2022).

Proyek pembangunan pesisir yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dapat mempercepat laju abrasi dan mengubah dinamika ekosistem laut (Haryani, 2022). Infrastruktur seperti tembok laut atau reklamasi yang tidak dikelola secara ekologis berpotensi menghambat aliran alami air laut serta mengganggu habitat biota pesisir (Mahendra & Purwanti, 2023). Hal ini berkontribusi pada penurunan hasil tangkapan ikan, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nelayan setempat (Muh Kamim, 2020).

Pembatasan akses terhadap laut akibat pembangunan pembatas laut dan sekitarnya telah menyebabkan ketimpangan sosial dan memperburuk kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Dari perspektif lingkungan, pembangunan pagar laut berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada garis pantai dan ekosistem laut (Palisu et al., 2022). Selain itu, juga dapat menghambat pergerakan biota laut, yang dapat berdampak negatif pada rantai makanan dan keseimbangan ekosistem (Saputra, 2025).

Pendekatan *Common Pool Resources* melihat bahwa sumber daya bersama seharusnya dikelola secara kolektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan, sementara perspektif ekologi politik menekankan bahwa relasi kuasa dalam tata kelola pesisir sering kali menguntungkan kelompok dengan dominasi ekonomi atau politik lebih besar (Priyanta, 2021). Sumber daya laut idealnya dikelola secara adil dan berkelanjutan, tetapi dalam banyak kasus, akses terhadap sumber daya ini dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik lebih besar (Andriyani, 2023).

Pembangunan pagar laut yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya alam telah terjadi di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk salah satunya yang terjadi di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, di mana pagar laut ilegal yang dibangun oleh pihak swasta menghambat akses nelayan ke laut dan memicu ketegangan sosial akibat kebijakan tata kelola pesisir yang tidak berpihak pada masyarakat.

Pembangunan pagar laut yang mengelilingi sebagian besar kawasan pesisir di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan nelayan Tarumajaya, baik dari segi aksesibilitas, ekonomi, maupun dinamika sosial mereka. Keberadaan pagar laut ini secara langsung mengubah pola kerja para nelayan Tarumajaya, membatasi ruang gerak mereka, serta menciptakan tantangan baru

dalam mempertahankan mata pencaharian mereka. Selain itu, masyarakat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan turut merasakan tekanan ekonomi akibat perubahan akses mereka terhadap laut. Hal ini kemudian memicu berbagai bentuk respons dari masyarakat, mulai dari protes terbuka hingga upaya negosiasi dengan pihak berwenang.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam dampak dari pembangunan pagar laut di wilayah Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi ini. Penelitian ini mengenaalisis dampak terhadap akses nelayan, konsekuensi ekonomi dan sosial, serta respon masyarakat terhadap perubahan yang terjadi pasca pembangunan pagar laut illegal tersebut di wilayah pesisir mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Moeloeng, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data terkait respon masyarakat terhadap pembangunan pagar laut illegal di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang masyarakat di wilayah Tarumajaya alami. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dimulai sejak 9 Januari Hingga 27 Februari di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Data- data yang dikumpulkan, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terdampak, termasuk nelayan, masyarakat pesisir, serta pemangku kebijakan untuk menggali perspektif dan pengalaman mereka dalam menghadapi perubahan akibat pembangunan pagar laut, serta observasi di lokasi pagar laut illegal tersebut dibangun, untuk mengamati dan memperhatikan bagaimana pembangunan pagar laut tersebut dapat menghambat keberlanjutan ekonomi para nelayan di wilayah Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi pola, makna, serta faktor-faktor yang memengaruhi konflik dan ketidakadilan dalam tata kelola pesisir. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan terhadap masyarakat serta bagaimana mereka beradaptasi dan merespons situasi yang terjadi.

HASIL

Respon Masyarakat dan Upaya Penolakan

Kondisi yang semakin sulit akibat pembangunan pagar laut memicu berbagai reaksi dari masyarakat pesisir. Sebagian besar dari mereka menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan ini dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk perlawanan yang paling umum dilakukan adalah aksi protes dan demonstrasi yang digelar oleh nelayan di berbagai daerah. Mereka berusaha menyuarakan aspirasi mereka kepada pihak berwenang dengan harapan ada solusi yang lebih adil dalam pengelolaan akses laut.

Selain aksi demonstrasi, terdapat juga upaya negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan komunitas nelayan dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Beberapa kelompok nelayan membentuk organisasi atau bergabung dengan lembaga advokasi untuk memperjuangkan hak mereka atas akses ke laut. Mereka menggunakan berbagai media, termasuk media sosial, untuk menyebarkan informasi dan membangun solidaritas dengan komunitas pesisir lainnya yang mengalami permasalahan serupa.

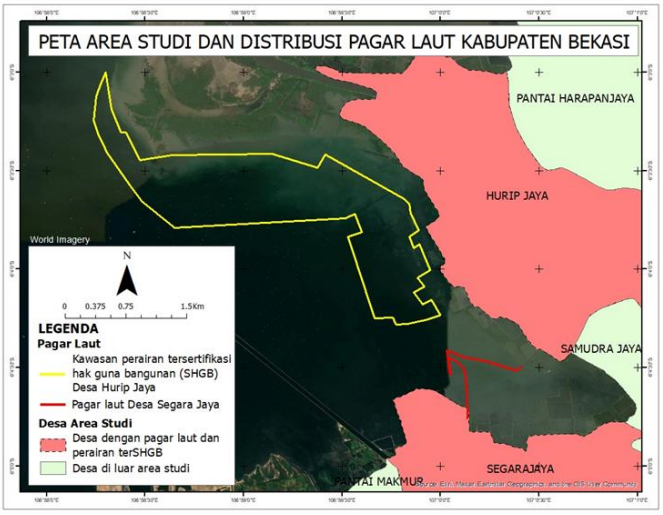
Namun, respons dari pemerintah terhadap perlawanan masyarakat cenderung beragam. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah mengakui adanya dampak negatif dari pagar laut dan berupaya mencari solusi kompromi, seperti memberikan kompensasi bagi nelayan yang terdampak. Akan tetapi, dalam banyak kasus lainnya, pemerintah lebih memilih untuk mempertahankan kebijakan tersebut dengan alasan pembangunan dan keamanan wilayah. Upaya kompensasi yang ditawarkan juga sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami nelayan, sehingga tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Dampak yang Ditimbulkan oleh Keberadaan Pagar Laut di Kabupaten Bekasi

1. Dampak Sosial

Sebelum keberadaan pagar laut, nelayan memiliki kebebasan dalam menentukan rute penangkapan ikan, baik di perairan dangkal maupun perairan yang lebih dalam. Akses yang tidak terbatas ini memungkinkan mereka untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sesuai dengan kondisi cuaca, arus laut, dan keberadaan ikan. Namun, setelah pagar laut dibangun, akses menuju laut menjadi terbatas dan terkontrol, sehingga banyak nelayan yang mengalami kesulitan dalam menjangkau wilayah tangkapan yang selama ini

menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Brikut merupakan peta dan distribusi pagar laut tersebut:



Gambar 1 Peta Area dan Distribusi Pagar Laut di Kabupaten Bekasi

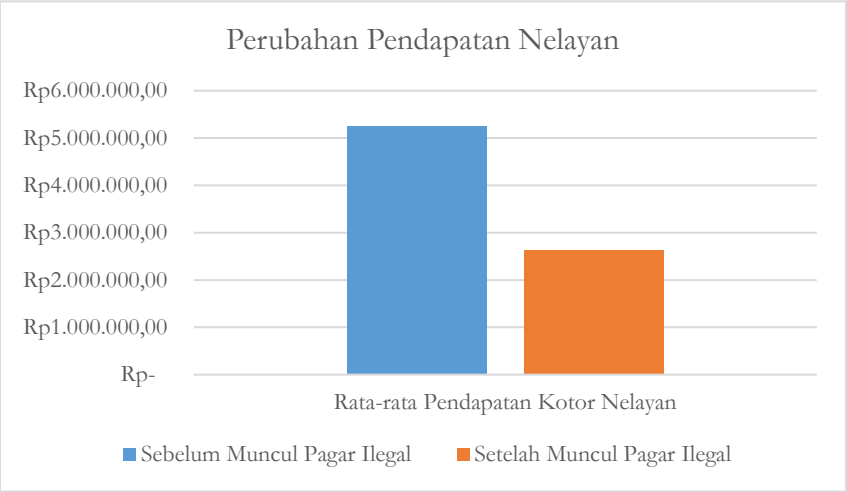
Salah satu tantangan utama yang dihadapi nelayan adalah meningkatnya jarak tempuh yang harus mereka lalui untuk mencapai perairan yang masih dapat diakses. Sebelum adanya pagar laut, nelayan bisa langsung melaut dari titik tertentu di pesisir. Namun, setelah pembangunan pagar, mereka harus mencari celah atau titik masuk yang dapat mereka lewati, yang sering kali berada di lokasi yang lebih jauh dari tempat mereka biasa beroperasi. Hal ini menyebabkan waktu perjalanan menjadi lebih lama, penggunaan bahan bakar meningkat, dan durasi efektif untuk menangkap ikan berkurang. Sebagai akibatnya, biaya operasional nelayan bertambah tanpa adanya jaminan peningkatan hasil tangkapan.

Keberadaan pagar laut juga mengubah pola penangkapan ikan. Beberapa nelayan yang memiliki perahu berukuran lebih kecil tidak mampu mencapai perairan yang lebih jauh karena keterbatasan daya jelajah kapal mereka. Akibatnya, mereka terpaksa menangkap ikan di perairan yang lebih dekat ke pantai, yang sering kali memiliki hasil tangkapan lebih sedikit dibandingkan dengan perairan yang lebih dalam. Hal ini menyebabkan persaingan semakin ketat di antara nelayan lokal, yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar komunitas nelayan.

2. Dampak Ekonomi

Dampak dari pagar laut tidak hanya dirasakan oleh individu nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas pesisir secara keseluruhan. Penurunan akses terhadap laut

berakibat langsung pada pengurangan hasil tangkapan ikan, yang kemudian berimplikasi pada berkurangnya pendapatan. Dengan biaya operasional yang meningkat dan hasil tangkapan yang menurun, banyak nelayan yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Situasi ini semakin diperburuk dengan meningkatnya harga bahan bakar dan peralatan penangkapan ikan, yang semakin membebani kondisi ekonomi nelayan kecil.



Grafik 1 Perubahan Pendapatan Nelayan

Dari data grafik di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya pagar laut, rata-rata pendapatan nelayan berkisar Rp5.260.920 per bulan, namun setelah akses ke laut dibatasi, angka tersebut turun drastis hingga Rp2.630.220 per bulan, mengalami penurunan sekitar 50%. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan. Pengurangan daya beli nelayan turut mempengaruhi sektor lain, seperti perdagangan ikan dan usaha kecil yang bergantung pada aktivitas perikanan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan pagar laut di Kabupaten Bekasi telah membatasi akses masyarakat nelayan terhadap wilayah pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama mereka. Temuan ini sejalan dengan reklamasi Teluk Jakarta dan proyek *Giant Sea Wall*, yang memperlihatkan bagaimana kebijakan tata kelola pesisir sering kali lebih menguntungkan pemodal dibanding masyarakat lokal (Putri et al., 2025). Seperti halnya di

Thailand dan Filipina, di mana privatisasi akses pesisir berdampak pada hilangnya mata pencaharian nelayan, pagar laut di Bekasi juga menyebabkan penurunan pendapatan akibat berkurangnya wilayah tangkapan (Charoenlerkthawin et al., 2022; Fabinyi et al., 2022). Selain dampak ekonomi, kebijakan ini memperburuk ketimpangan sosial dengan memperkuat kontrol negara dan pemodal atas ruang pesisir, sementara nelayan di wilayah Tarumajaya kehilangan hak akses yang sebelumnya bersifat komunal (Priyanta, 2021). Eksklusi sosial yang muncul turut menghambat keberlanjutan ekonomi dan budaya masyarakat pesisir, menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang jelas, eksploitasi sumber daya laut cenderung semakin tidak terkendali (Ali et al., 2021; Fabinyi et al., 2022; Quina & Subagiyo, 2020).

Konflik yang muncul pada pembangunan pagar laut di Kabupaten Bekasi, merupakan akibat ketimpangan dalam distribusi hak dan sumber daya. Kebijakan ini membatasi akses masyarakat nelayan Tarumajaya terhadap wilayah pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama mereka. Nelayan sebagai kelompok subordinat tidak memiliki ruang partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diimplementasikan lebih menguntungkan kelompok dominan. Akibatnya, para nelayan di wilayah Tarumajaya kehilangan hak akses yang sebelumnya bersifat komunal, yang berujung pada penurunan hasil tangkapan dan pendapatan serta meningkatnya eksklusi sosial yang menghambat keberlanjutan ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan teori konflik sosial, yang menjelaskan bahwa dalam setiap kebijakan pembangunan, terdapat relasi kuasa antara aktor yang memiliki kendali atas kebijakan dengan kelompok yang terdampak (Andriyani, 2023; Kushadajani & Permana, 2020). Dalam temuan ini, nelayan mengalami subordinasi karena ketimpangan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Penelitian sebelumnya pada wilayah Desa Nanga Riyoi, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat juga menunjukkan bahwa proyek pembangunan berbasis infrastruktur sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan partisipasi dalam perencanaan (Markus, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan pagar laut mengubah pola akses dan pemanfaatan ruang pesisir yang selama ini menjadi bagian integral dari kehidupan nelayan. Ruang yang sebelumnya bersifat komunal berubah menjadi area terbatas yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Akibatnya, pembangunan ini memperkuat marginalisasi nelayan, mempersulit keberlanjutan ekonomi mereka, serta berpotensi menghilangkan

identitas sosial dan budaya yang telah terbentuk secara turun-temurun. Temuan ini sejalan dengan konsep keadilan spasial menekankan bahwa distribusi ruang harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal dan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan segelintir aktor ekonomi dan politik (Setianto & Gamal, 2021; Wardana, 2022). Dalam kasus pembangunan pagar laut, teori ini menjelaskan bagaimana kebijakan tata ruang dapat menciptakan ketidakadilan struktural dengan mengutamakan kepentingan kelompok dominan dan membatasi akses kelompok rentan. Studi sebelumnya pada Desa Batu dan Sampulungan menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan spasial cenderung memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir (Anggariani et al., 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut lebih berpihak kepada kepentingan aktor ekonomi kuat, seperti pemodal dan pengembang proyek, sementara nelayan sebagai aktor lokal harus menanggung dampak negatifnya. Selain itu, proyek ini mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan karena tidak mempertimbangkan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam banyak kasus, pengabaian terhadap aspek sosial-ekologis justru memicu resistensi masyarakat yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka antara nelayan dengan pemerintah maupun dengan entitas bisnis yang terkait dengan proyek tersebut. Perspektif ekologi politik menyoroti bahwa konflik lingkungan tidak hanya berkaitan dengan masalah ekologi itu sendiri, tetapi juga dengan struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak mengakses dan mengontrol sumber daya alam (Mahulae, 2020; Rahasthera, 2021). Dalam konteks ini, ketimpangan akses terhadap sumber daya mencerminkan dominasi aktor ekonomi kuat atas kelompok masyarakat rentan. Studi sebelumnya pada Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa proyek pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial cenderung memicu perlawanan dari kelompok terdampak (Nugroho et al., 2023).

Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali di wilayah pesisir telah menyebabkan degradasi lingkungan dan konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta (Bidayani & Kurniawan, 2020). Wilayah pesisir yang seharusnya menjadi pusat aktivitas perikanan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan justru mengalami tekanan besar akibat urbanisasi, eksploitasi sumber daya, serta lemahnya regulasi dalam pengelolaan tata ruang pesisir. Salah satu manifestasi dari konflik ini adalah pembangunan pagar laut yang membatasi akses nelayan terhadap wilayah tangkapannya, seperti yang terjadi di Bekasi.

Kasus pembangunan pagar laut di wilayah Tarumajaya menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan tata ruang pesisir yang tidak inklusif dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Pratama, 2025). Keberadaan pagar laut ilegal yang dibangun oleh pihak swasta telah menghambat akses nelayan ke laut, sehingga mengurangi ruang gerak mereka dalam mencari ikan. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap penurunan hasil tangkapan, meningkatkan biaya operasional akibat perlunya akses alternatif yang lebih jauh, serta memperburuk ketimpangan ekonomi di antara kelompok nelayan kecil yang tidak memiliki modal untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Selain aspek ekonomi, pagar laut juga menciptakan eksklusi sosial, di mana masyarakat pesisir yang selama ini memiliki hubungan erat dengan laut secara historis dan budaya justru semakin terpinggirkan dari wilayahnya sendiri.

Pembangunan pagar laut mencerminkan dominasi kelompok berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir (Priambodo, 2025). Pemerintah dan pemodal besar yang memiliki kendali terhadap kebijakan tata ruang sering kali mengabaikan hak masyarakat lokal dalam mengakses sumber daya alam. Konflik ini juga terlihat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta dan proyek *Giant Sea Wall*, di mana kebijakan perlindungan pesisir lebih berpihak pada kepentingan bisnis dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Pola yang sama terjadi di Bekasi, di mana lemahnya implementasi regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2007 menyebabkan masyarakat nelayan kehilangan hak mereka atas laut sebagai sumber penghidupan utama

Perubahan garis pantai menunjukkan bahwa intervensi struktural seperti pagar laut dapat mempercepat abrasi di area yang tidak terlindungi, mengubah dinamika arus laut, serta mengganggu habitat biota laut (Aldian et al., 2022). Pagar laut di Bekasi, telah membatasi pergerakan ikan dan organisme laut lainnya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rantai makanan serta keseimbangan ekosistem pesisir. Selain itu, sedimentasi yang terjadi akibat perubahan pola arus laut dapat merusak ekosistem *mangrove* dan terumbu karang, yang sebenarnya memiliki peran alami dalam menjaga stabilitas pesisir.

Sebagai alternatif solusi, pendekatan berbasis ekosistem dapat menjadi strategi yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan pesisir karena mampu menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir (Ekasari et al., 2024; Kusumastanto et al., 2024; Zega et al., 2024). Restorasi mangrove dan rehabilitasi ekosistem pesisir dapat berfungsi sebagai perlindungan alami terhadap abrasi, sekaligus tetap

memberikan akses bagi masyarakat nelayan. Selain itu, pendekatan tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan pesisir tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekologis.

KESIMPULAN

Pembangunan pagar laut telah membatasi akses nelayan terhadap wilayah tangkapan mereka, meningkatkan ketimpangan ekonomi, serta memperkuat kontrol negara dan pemodal atas ruang pesisir, sementara nelayan semakin terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menciptakan eksklusi sosial, meningkatkan biaya operasional nelayan, serta memicu konflik antara masyarakat pesisir dengan pemerintah dan pihak swasta. Dalam konteks keadilan spasial dan ekologi politik, pagar laut mencerminkan dominasi aktor ekonomi kuat yang mengabaikan hak-hak komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan pesisir yang lebih inklusif dan berbasis ekosistem untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat pesisir.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan pagar laut tidak hanya berdampak negatif terhadap akses nelayan, tetapi juga berkontribusi pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Penelitian ini berperan penting dalam mengidentifikasi hubungan antara kebijakan pengelolaan pesisir dan kondisi masyarakat lokal, serta menekankan perlunya intervensi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, penelitian ini memberikan wawasan yang diperlukan untuk merumuskan strategi yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup analisis lebih mendalam tentang dampak jangka panjang dari kebijakan ini, serta eksplorasi alternatif solusi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Aldian, R., Zuryani, E., & Ulni, A. Z. P. (2022). Perubahan Garis Pantai Sebagai Akibat Dari Abrasi Dan Akresi Di Kawasan Pesisir Pantai Barat Sumatera Barat. *Social, Humanities,*

and Educational Studies (SHES): Conference Series, *5*(4), 152–161. https://doi.org/10.20961/shes.v5i4.69042

Ali, M. M., Aditya, Z. F., & Fuadi, A. B. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*, *17*(4), 799–827. https://doi.org/10.31078/jk1745

Anastasia, S., Nurohman, R., Tegar Nabil Zaidan, D., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *4*(2), 545–553. https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485

Andriyani, L. (2023). Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang terbuka Hijau. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *8*(1), 77–98. https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.15593

Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2020). Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai. *SIGn Journal of Social Science*, *1*(1 SE-Articles), 15–29. https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96

Basri, H. (2021). Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 1–27. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713

Bidayani, E., & Kurniawan, K. (2020). Conflict Resolution in Coastal Resource Utilization among Fishermen and Unconventional Tin Miners. *Society*, *8*(1), 13–22. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.139

Charoenlerkthawin, W., Bidorn, K., Burnett, W. C., Sasaki, J., Panneerselvam, B., & Bidorn, B. (2022). Effectiveness of grey and green engineered solutions for protecting the low-lying muddy coast of the Chao Phraya Delta, Thailand. *Scientific Reports*, *12*(1), 20448. https://doi.org/10.1038/s41598-022-24842-x

Ekasari, A. A. K., Partama, I. G. Y., & Yastika, P. E. (2024). Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Kolaboratif Untuk Menunjang Ekowisata Pesisir Di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal Alam Lestari*, *9*(1), 21–29. https://doi.org/10.36733/alamlestari.v9i1.9468

Fabinyi, M., Belton, B., Dressler, W. H., Knudsen, M., Adhuri, D. S., Abdul Aziz, A., Akber, M. A., Kittitornkool, J., Kongkaew, C., Marschke, M., Pido, M., Stacey, N., Steenbergen, D. J., & Vandergeest, P. (2022). Coastal transitions: Small-scale fisheries, livelihoods, and maritime zone developments in Southeast Asia. *Journal of Rural Studies*, *91*, 184–194. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.02.006

Haryani, E. B. S. (2022). Kerusakan Pesisir Akibat Sedimentasi dan Abrasi di Pantai Karawang. *Grouper*, *13*(2), 117–125. https://doi.org/10.30736/grouper.v13i2.127

Krisna, B. A., Paturusi, S. A., & Wirawibawa, I. B. G. (2021). Konflik Keruangan di Wilayah Pesisir Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan (JUARA)*, *4*(1), 11–26. https://doi.org/10.31101/juara.v4i1.1307

Kunzmann, A., Schwarzbauer, J., Palm, H. W., Damriyasa, M., Yulianto, I., Kleinertz, S., Oetam, V. S. P., Abdul-Aziz, M. A., Mrotzek, G., Haryanti, H., Saluz, H. P., Arifin, Z., Baum, G., Dsikowitzky, L., Dwiyitno, Irianto, H. E., van der Wulp, S., Hesse, K. J., Ladwig, N., … Damar, A. (2022). Impact of megacities on the pollution of coastal areas—the case example Jakarta Bay. In *Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystems (SPICE)* (pp. 285–346). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815050-4.00001-8

Kushadajani, K., & Permana, I. A. (2020). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(1), 70–80. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318

Kusumastanto, T., Sapanli, K., Ambarwulan, W., Akbar, H. I. A., & Rosalia, A. A. (2024). Strategi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah Secara Berkelanjutan di Pesisir Jakarta. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, *6*(3), 936–939. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0603.936-939

Mahendra, R. A., & Purwanti, T. (2023). Analisis Dampak Proyek Pembangunan Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Utara Terhadap Ekonomi, Sosial dan Lingkungan: Tinjauan Kritis. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, *6*(2), 235–247. https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.235-247

Mahulae, P. J. M. (2020). Perubahan Lingkungan Perairan Danau Toba Akibat Budidaya Perikanan Dalam Perspektif Ekologi Politik. *Inovasi*, *17*(1), 109–114. https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i1.190

Markus, M. (2022). Partisipasi Sosial dalam Pembangunan Desa: Menilik Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ngana Riyoi. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, *19*(2), 287–294. https://doi.org/10.51826/fokus.v19i2.566

Moeloeng, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Muh Kamim, A. B. (2020). Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *11*(1), 105–120. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1587

Nugroho, T., Maulana, J. F., Cakraningrat, K., & Ratnasari, Y. (2023). Membangun Kesadaran Hukum dalam Perjuangan Keadilan Lingkungan Pertambangan di Kabupaten Trenggalek. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(7), 784–791. https://doi.org/10.55681/swarna.v2i7.760

Palisu, B. J., Fiqri, M. R., & Assidiq, F. M. (2022). Investigasi Bencana Abrasi di berbagai Wilayah Abrasi di Masyarakat Pesisir di Indnesia. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, *5*(2), 157–161. https://doi.org/10.62012/sensistek.v5i2.24264

Pratama, R. B. (2025). International law of the Sea Enforcement on Illegal Sea Defences: A Case Study of Tangerang and Bekasi Waters. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, *5*(2), 494–499. https://doi.org/https://doi.org/10.54443/ijerlas.v5i2.2435

Priambodo, B. B. (2025). Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait "Pagar Laut Misterius" di Pantai Utara Tangerang. *UNES Law Review*, *7*(3), 1221–1233. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2412

Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(1), 20–29. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361

Putri, A., Richardo, B. Y., Zid, M., Setiawan, C., & Seta, A. K. (2025). Transformasi Pesisir Jakarta: Kajian Komprehensif Giant Sea Wall untuk Keberlanjutan Sosial, Ekonomi dan Ekologis. *Jurnal Syntax: Admiration*, *6*(1), 115–127.

Quina, M., & Subagiyo, H. (2020). Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

"Penegakan Hukum di Laut: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *2*(1), 93–104. https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.174

Rahasthera, W. A. (2021). Kajian Sosial Ekonomi Sengketa Lingkungan Berbasis Ekosistem. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, *2*(1), 35–39. https://doi.org/10.55448/ems.v2i1.43

Saputra, B. (2025). *Akibat Pagar Laut, Ekonom Taksir Kerugian Mencapai Rp 116,91 Miliar*. AntaraJatim.

Setianto, M. A. S., & Gamal, A. (2021). Spatial justice in the distribution of public services. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *673*(1), 1–9. https://doi.org/10.1088/1755-1315/673/1/012024

Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(2), 163–173. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514

Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(1), 1–41. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41

Zega, A., Susanti, N. M., Tillah, R., Laoli, D., Telaumbanua, B. V., Zebua, R. D., Dawolo, J., Zebua, O., & Gea, A. S. A. (2024). Strategi Inovatif Dalam Menghadapi Degradasi Ekosistem: Kajian Terbaru Tentang Peran Vital Hutan Mangrove Dalam Konservasi Lingkungan. *Zoologi: Jurnal Ilmu Peternakan, Ilmu Perikanan, Ilmu Kedokteran Hewan*, *2*(2), 71–83. https://doi.org/10.62951/zoologi.v2i2.65